



PEMBANGUNAN SMELTER NIKEL DI KEK KALSEL

Pemilik PT. Jhonlin Group Syamsudin Andi Arsyad (empat kiri) didampingi Komisaris Utama PT. Jhonlin Agro Raya Jhony Saputra (empat kanan), Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (tengah), pimpinan CNGR China Deng Wei Ming (tiga kiri) melihat penanaman tiang pancang pertama pembangunan pengolahan nikel (smelter) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Senin (25/7). Perusahaan nasional PT. Jhonlin Group melalui anak perusahaan PT. Anugrah Barokah Cakrawala membangun smelter nikel berkapasitas 40.000 ton per tahun di atas lahan seluas 329 hektare dalam upaya mendukung program hilirisasi industri yang menjadi prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta mendukung Kalsel sebagai pintu gerbang IKN Nusantara.

Grup MIND ID Gabung Jadi Anggota UN Global Compact

“Dengan menjadi anggota UNGC, MIND ID berdiri sejajar dengan perusahaan tambang dunia terkemuka lainnya selaras dengan rencana jangka panjang MIND ID untuk menjadi World Class Company yang memiliki komitmen keberlanjutan” ujar Dany Amrul Ichdan.

JAKARTA (IM) - Holding Industri Pertambangan MIND ID bergabung menjadi anggota United Nations Global Compact (UNGC). Masuknya MIND ID ke dalam keanggotaan UNGC ini dalam rangka mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

“Dengan memasukkan Sepuluh Prinsip UNGC ke dalam strategi, kebijakan dan prosedur perusahaan, MIND ID tidak hanya menegakkan tanggung jawab dasar terhadap manusia dan planet, tetapi juga mempersiapkan

perusahaan untuk kesuksesan jangka panjang dan masa depan yang lebih baik,” ujar Direktur Hubungan Kelembagaan MIND ID, Dany Amrul Ichdan dalam keterangan tertulis, Senin (25/7).

Diketahui, UNGC diremikan pada tahun 2000 silam. Awalnya, organisasi tersebut berfokus untuk mendukung pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). Namun setelah MDGs berakhir pada tahun 2015, UNGC mendukung tujuan pencapaian berkelanjutan (SDGs) pada

tahun 2030.

Diungkapkan Dany, status keanggotaan UNGC MIND ID berdasarkan Letter of Commitment yang dikirimkan kepada General Secretary PBB pada tanggal 28 Juni 2022 yang berisi komitmen MIND ID untuk mendukung 10 Prinsip UNGC, di antaranya Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja, Lingkungan dan Anti Korupsi.

Adapun sepuluh prinsip tersebut merupakan perwujudan dari The Universal Declaration of Human Rights, The International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, The Rio Declaration on Environment and Development, dan The United Nations Convention Against Corruption.

“Dengan menjadi anggota UNGC, MIND ID berdiri sejajar dengan perusahaan tambang dunia terkemuka lainnya selaras dengan rencana jangka

panjang MIND ID untuk menjadi World Class Company yang memiliki komitmen keberlanjutan” ujar Dany.

Di sisi lain, pihaknya memastikan pengelolaan tambang dilakukan secara efisien, serta meminimalisir dampak lingkungan. Hal ini sebagaimana acuan praktik pertambangan yang terbaik (good mining practices).

Dany menjelaskan, dalam hal aspek lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan, MIND ID mendorong perusahaan anggotanya untuk melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan serta mengadopsi standar internasional terkait pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan.

Sementara untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Keberlanjutan Environment, Social, and Governance (ESG) dan mendukung pencapaian SDGs, MIND ID telah me-

nyusun framework dengan mengacu kepada ISO 26000 sebagai Panduan Keberlanjutan, Prinsip Penambangan International Council on Mining and Metals (ICMM) sebagai Standar Kinerja Keberlanjutan, dan GRI bersama SDGs sebagai struktur pengungkapan informasi kepada para pemangku kepentingan.

“Keberlanjutan menjadi salah satu fokus dan bagian dari strategi Grup MIND ID. Implementasi keberlanjutan di seluruh aspek termasuk menjadi anggota UN Global Compact dan mendukung pencapaian SDGs merupakan perwujudan dari Noble Purpose atau Tujuan Mulia MIND ID, yakni membangun peradaban, kesejahteraan dan masa depan yang lebih cerah,” kata Dany. **hen**

Ini Yang Dilakukan DJP untuk Tingkatkan Penerimaan Pajak

JAKARTA (IM) – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan pemerintah berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan penerimaan dari semua subjek pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

“Hal ini untuk merespon adanya pertanyaan dari masyarakat terkait bagaimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggali potensi penerimaan pajak,” ungkap Neil dalam keterangannya di laman Kemenkeu, Senin (25/7).

Neilmaldrin menjelaskan DJP terus memperbaiki sistem administrasi serta kepastian regulasinya untuk memperluas basis data perpajakan. Pemerintah dalam hal ini telah memiliki kewenangan untuk meminta data keuangan be-

rupa laporan keuangan, bukti, maupun keterangan dari lembaga jasa keuangan, seperti perbankan, pasar modal, perasuransi, atau jasa keuangan lainnya berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang. Pemerintah Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam pertukaran data otomatis (AEOI) dengan banyak yurisdiksi di dunia.

Untuk itu, DJP melakukan tugas dan fungsinya dengan melakukan pengujian baik formal maupun material terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan juga melakukan pengawasan. Kegiatan pengujian kepatuhan dan pengawasan pajak di Indonesia didasarkan pada Self-Assessment System, di mana Wajib Pajak menghitung,

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Selain itu pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak juga dipetakan berdasarkan skala usaha wajib pajak, yaitu Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Kewilayahan. Klasifikasi ini dimaksudkan agar pengawasan berjalan lebih efisien.

Dalam melakukan penggalan potensi pajak, DJP juga menerapkan cara yang terstruktur, metodis, dan objektif dengan menggunakan Compliance Risk Management (CRM) untuk memetakan profil Wajib Pajak berbasis risiko kepatuhan. DJP juga memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya secara sukarela melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Sejalan dengan hal itu, Neil menegaskan bahwa DJP terbuka terhadap informasi terkait kegiatan usaha atau potensi pajak dari masyarakat.

“Setiap informasi yang masuk, kami tindaklanjuti secara sistematis. Kami punya prosedur bernama pemeriksaan atas Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLPI),” tuturnya.

Neil juga meninformasikan, pemerintah sudah mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NPWP. Dengan implementasi NIK sebagai NPWP, semua yang ber-NIK otomatis masuk di dalam sistem administrasi perpajakan dan wajib memenuhi kewajiban perpajakannya apabila sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Meski begitu, petugas pajak diwajibkan menjaga kerahasiaan data wajib pajak sesuai dengan Pasal 34 UU KUP. • dot

Jamkrindo Dorong UMKM Masuk Ekosistem Digital

JAKARTA (IM) - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Pasalnya ada sejumlah pembinaan yang dilakukan Jamkrindo untuk mewujudkan hal tersebut.

Direktur Utama Jamkrindo Putrama Wahyu Setyawan mengatakan, Jamkrindo mendorong seluruh pelaku usaha binaan untuk segera mengadopsi pemanfaatan teknologi sehingga dapat bersaing di masa kenormalan baru.

Menurutnya, dengan penerapan strategi yang tepat berbasis teknologi, UMKM dapat berperan dalam membangkitkan perekonomian nasional sekaligus turut mendukung fokus penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia 2022 yakni transformasi ekonomi digital.

“Selain memberikan kemudahan akses permodalan, Jamkrindo turut menghubungkan UMKM ke ekosistem digital, termasuk teknik pemasaran yang sesuai untuk mengoptimalkan peluang pasar dan meningkatkan penjualan secara lebih efektif dan efisien dengan dukungan digitalisasi,” kata Putrama dalam keterangan tertulis, Senin (25/7).

Ia menjelaskan, Jamkrindo siap berpartisipasi dalam penguatan peran UMKM agar naik kelas dan mendukung keberlanjutan usahanya, sehingga akan berdampak positif terha-

dap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Tingkat literasi digital yang masih relatif rendah secara rata-rata memang menjadi tantangan. Namun, kami optimis bahwa target digitalisasi UMKM tersebut dapat direalisasikan apabila seluruh pemangku kepentingan saling bersinergi dan berkolaborasi,” tutur Putrama.

Ia menjelaskan, Jamkrindo melakukan pembinaan dalam hal pemanfaatan digitalisasi, seperti optimalisasi media sosial, branding, memperluas marketing dengan e-commerce, pencatatan laporan keuangan menggunakan aplikasi, peningkatan kualitas produk, dan lainnya.

Sebagai bentuk kesiapan internal menghadapi era industri 4.0 dan ekonomi digital, sambung Putrama, Jamkrindo telah menghadirkan berbagai transformasi dalam bisnis melalui teknologi informasi yang tepat guna, sehingga berbagai kerja sama dengan para mitra UMKM dan perbankan atau lembaga keuangan dapat dilakukan secara online, baik *host to host*, menggunakan *web service*, maupun aplikasi lainnya seperti Jamkrindo Online Suretyship (JOS).

Selain itu, pengembangan platform UMKMLayak melalui *umkmlayak.co.id* untuk program pemberdayaan dapat menjadi jembatan yang mempertemukan mitra dengan lembaga keuangan. • dro

Bank Capital Fokus Kembangkan Layanan Digital

JAKARTA (IM) - Pandemi virid COVID-19 yang berkepanjangan menjadi tantangan bagi Bank Capital untuk tetap dapat menjaga momentum pertumbuhannya.

Salah satunya melalui pengelolaan aktiva produktif yang diharapkan mampu memberikan pondasi yang kuat bagi perjalanan Bank Capital di masa mendatang.

Di tengah kondisi yang penuh tantangan Bank Capital memanfaatkan momentum untuk memperkuat layanan digital yang dimiliki.

“Bank Capital tetap fokus untuk mengembangkan layanan digital dengan tujuan menghadirkan customer experience yang optimal bagi seluruh nasabah,” kata Direktur Utama Bank Capital Wahyu Dwi Aji, dalam Paparan Kinerja Perseroan, di Jakarta, Senin (25/7).

Kemudian soal kinerja keuangan tahun 2021, Wahyu mengatakan, secara keseluruhan tetap optimal dan terjaga meskipun berada di tengah tantangan pandemi Covid-19.

Untuk total aset tumbuh 10,38% dari Rp.20.22 triliun pada akhir tahun 2020 menjadi Rp.22,32 triliun



Direktur Utama Bank Capital Wahyu Dwi Aji (kedua dari kiri) bersama jajarannya usai Paparan Kinerja Perseroan.

pada akhir tahun 2021. Per akhir Juni 2021, Total Aset dibukukan sebesar Rp.20.81 triliun.

DPK (Dana Pihak Ketiga) tumbuh 14,33% dari Rp.16,37 triliun pada akhir tahun 2020 menjadi Rp.18,7% triliun pada akhir tahun 2021.

Pertumbuhan DPK yang diraih oleh Bank seiring dengan peningkatan pada simpanan berjangka dan tabungan

di 2021 yaitu masing-masing sebesar Rp1,2 triliun dan Rp1,7 triliun.

Menurut Wahyu Dwi Aji, peningkatan DPK dipicu oleh program-program yang dilakukan Bank Capital untuk menarik minat dari nasabah baru ataupun menambah kepercayaan dari nasabah yang sudah ada.

Per akhir Juni 2022, DPK mencapai Rp17,78 triliun. Dari sisi kredit yang di-

berikan, mengalami penurunan sebesar 64,19% dari Rp.6,44 triliun pada akhir tahun 2020 menjadi Rp4,13 triliun pada akhir tahun 2021.

Penurunan kredit yang disalurkan terutama disebabkan pelunasan yang dilakukan oleh beberapa debitur korporasi yang sejalan dengan rencana transformasi Bank untuk fokus pada kredit pensiunan dan retail.

Per akhir Juni 2022, kredit yang diberikan mencapai Rp2,36 triliun. NPL Grogas dan NPL Net per akhir tahun 2021 sama dengan tahun 2020 yaitu masing-masing sebesar 0,00% dan 0,00%.

Bank senantiasa fokus untuk menyelesaikan kredit bermasalah dengan cepat serta berbagai langkah guna menjaga kualitas kredit. Per akhir Juni 2022, NPL Gross dan NPL Net masing-masing sebesar 0,21% dan 0,06%.

Dari sisi profitabilitas, tahun 2021 Bank Capital membukukan laba bersih sebesar Rp34,78 milyar sementara tahun sebelumnya sebesar Rp61,41 milyar. Per akhir Juni 2022, laba bersih mencapai sebesar Rp9,23 milyar.

Lebih lanjut Wahyu Dwi Aji mengungkapkan pada triwulan III 2022, Bank Capital berencana melakukan panambahan modal melalui PUT (Penawaran Umum Terbatas) IV dengan memberikan HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) sebanyak banyaknya 20 milyar lembar saham dengan harga nominal Rp100 per lembar saham guna ekspansi usaha perseroan. • kris

BNI Dukung PLN E-Mobility Day, Perkuat Ekosistem Kendaraan Listrik

JAKARTA (IM) - PT Bank Negara Indonesia (Perse-ro) Tbk atau BNI memperkuat komitmen dalam penguatan ekosistem kendaraan listrik dengan mendukung PLN E-Mobility Day: Driving The Future, yang digelar pada 18-24 Juli 2022 di Denpasar, Bali.

PLN E-Mobility Day: Driving The Future mengajak masyarakat mengalihkan penggunaan ke energi bersih, dengan mengenal lebih dalam kendaraan listrik. Sebagai pameran kendaraan listrik terbesar

di Bali, acara tersebut diisi dengan berbagai kegiatan seperti konvoi kendaraan listrik Jakarta-Bali hingga uji jalan kendaraan listrik.

Corporate Secretary BNI Mucharom mengatakan dukungan ini sejalan dengan kepercayaan PLN terhadap BNI sebagai mitra strategis dalam upaya mempercepat transisi energi baru dan terbarukan.

Dalam acara ini PLN mengundang BNI untuk turut mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik, baik dari

sisi kendaraan listrik maupun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Terlebih, stasiun pengisian ini ke depannya akan menjadi bisnis yang potensial, seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan kendaraan listrik nasional.

“PLN E-Mobility Day: Driving The Future merupakan kesempatan bagi kami untuk menunjukkan komitmen BNI Go Green. Terlebih, segmen ini semakin menunjukkan kinerja yang progresif sehingga semakin potensial

bagi perbankan untuk ikut mengembangkan berbagai kebutuhan layanan perbankan mulai dari pembiayaan konsumen dan investasi,” kata Mucharom dalam keterangan resmi di Jakarta, seperti dilansir Antara, Senin (25/7).

Ia melanjutkan BNI merupakan pionir di industri perbankan sebagai lembaga keuangan yang mengoperasikan dua SPKLU skema kerjasama, bekerja sama dengan PLN.

Untuk mendorong opti-

malisasi SPKLU, BNI juga semakin proaktif mendorong kinerja *consumer banking* untuk pembiayaan kepemilikan kendaraan listrik. “Kami menghadirkan kemudahan kepemilikan kendaraan listrik melalui pembiayaan konsumen BNI dan pembiayaan melalui anak usaha BNI yaitu BNI Multifinance, dengan bunga yang lebih menarik dibandingkan dengan pembiayaan untuk mobil konvensional,” katanya. • pan